



Dinamika dan Hambatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses DPRD Kabupaten Merauke

Hetwika Maria Herda Kelanit¹, Maria Margareta Reginaldis², Felix Rada³, Yokbeth Gewaljay⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Publik, STIA Karya Dharma Merauke

Article History

Received : 10-02-2026

Revision: 12-02-2026

Accepted : 27-02-2026

Published: 28-02-2026



Copyright (c) 2026 Journal Of Political and Development Issue

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

How to cite:

Reginaldis, M. M., Herda Kelanit, H. M., Rada, F., & Gewaljay, Y. (2026). Dinamika dan Hambatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada masa Reses DPRD Kabupaten Merauke: Perspektif Governance dan Representasi Politik. *Journal Of Political and Development Issue*, 2(2), 25–33.

Abstract

This study examines the dynamics and barriers in absorbing public aspirations during the recess period of the Regional House of Representatives (DPRD) in Merauke Regency. The recess is a key mechanism for democratic representation, allowing legislators to engage directly with constituents. However, in practice, the effectiveness of aspiration absorption remains questionable. This research employs a qualitative case study approach through in-depth interviews, observation, and document analysis involving DPRD members, Bappeda officials, and community representatives. The findings reveal that although the recess provides a formal platform for public participation, the process is constrained by structural, political, and institutional barriers. These include misalignment between public aspirations and regional development planning (RPJMD), limited fiscal capacity, bureaucratic hierarchy, political intervention, and low accountability in follow-up actions. The study concludes that aspiration absorption remains procedural rather than deliberative, failing to produce transformative outcomes. Strengthening participatory mechanisms, integrating public input into planning systems, and improving transparency are essential for enhancing democratic governance at the local level.

Keywords: Public Aspirations; DPRD Recess; Local Governance; Accountability; Political Dynamics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika dan hambatan dalam menyerap aspirasi publik selama masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Merauke. Reses adalah mekanisme utama untuk perwakilan demokratis, memungkinkan legislator untuk terlibat langsung dengan konstituen. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penyerapan aspirasi masih dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan anggota DPRD, pejabat Lapapeda, dan perwakilan masyarakat. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun reses menyediakan platform formal untuk partisipasi publik, prosesnya dibatasi oleh hambatan struktural, politik, dan kelembagaan. Di antaranya ketidakselarasan antara aspirasi publik dan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), keterbatasan kapasitas fiskal, hierarki birokrasi, intervensi politik, dan rendahnya akuntabilitas dalam tindak lanjut. Studi ini menyimpulkan bahwa penyerapan aspirasi tetap prosedural daripada deliberatif, gagal menghasilkan hasil transformatif. Memperkuat mekanisme partisipatif, mengintegrasikan masukan publik ke dalam sistem perencanaan, dan meningkatkan transparansi sangat penting untuk meningkatkan tata kelola demokrasi di tingkat lokal. Ialah sebabnya model yang mirip dengan Amerika Serikat akan bermanfaat untuk mengendalikan beberapa perilaku dalam upaya-upaya tersebut. Mengingat bahwa kasus Valio diperiksa berdasarkan hukum UE, akan menarik untuk melihat apakah keputusannya akan diingat sebagai 'kekeliruan susu' atau akan mengubah wajah hukum kasus seperti yang ada saat ini

Kata Kunci: Aspirasi Publik; Reses DPRD; Tata Kelola Daerah; Akuntabilitas; Dinamika Politik

1. Pengantar

Penyerapan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif daerah dalam sistem demokrasi lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban untuk menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah kegiatan reses. Reses merupakan sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen yang bertujuan untuk menjaring kebutuhan, kepentingan, dan permasalahan masyarakat secara langsung.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penyerapan aspirasi melalui reses seringkali menghadapi berbagai tantangan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak selalu terealisasi dalam kebijakan publik maupun program pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses partisipasi publik dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Merauke.

Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek partisipasi dan collaborative governance dalam proses penyerapan aspirasi. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara khusus mengkaji dinamika dan hambatan yang terjadi dalam proses tersebut. Padahal, pemahaman terhadap hambatan sangat penting untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Secara empiris, pelaksanaan reses di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya

berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, keterbatasan anggaran, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam tindak lanjut aspirasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penyerapan aspirasi belum berjalan secara optimal dan masih bersifat administratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan hambatan dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses DPRD Kabupaten Merauke. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji penyerapan aspirasi masyarakat tidak hanya dari perspektif partisipasi atau *collaborative governance*, tetapi secara khusus menyoroti dinamika kegagalan penyerapan aspirasi dalam konteks politik lokal, kesenjangan antara aspirasi dan dokumen perencanaan (RPJMD), serta rendahnya akuntabilitas tindak lanjut. Studi ini menawarkan perspektif kritis terhadap praktik reses yang selama ini cenderung dianggap sebagai mekanisme formal demokrasi, namun belum sepenuhnya menghasilkan outcome yang substantif.

2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

2.1 Aspirasi Masyarakat dan Representasi Politik

Aspirasi masyarakat merupakan elemen yang dasar dalam sistem demokrasi, khususnya dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Menurut Slameto, aspirasi adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di masa depan (Slameto, 2003). Aspirasi Masyarakat merupakan kebutuhan kolektif yang harus direspon oleh pemerintah sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik.

Dalam perspektif administrasi publik modern, aspirasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keinginan publik semata namun sebagai input dalam sistem kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh David Easton yang menempatkan aspirasi masyarakat sebagai *demands* dalam sistem politik yang kemudian diproses menjadi kebijakan publik (*output*) (Mulyadi, 2015). Lebih lanjut disampaikan oleh Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi Masyarakat termasuk dalam penyampaian aspirasi meliputi beberapa tahap antara lain: pengamblan Keputusan, pelaksanaan, pemamfaatan hasil, dan evaluasi (Cohen and Uphoff, 1980). Dalam konteks reses DPRD, aspirasi masyarakat idealnya tidak berhenti pada saat penyampaian tetapi harus diikuti dengan proses tindak lanjut yang nyata.

Dalam konteks politik, aspirasi masyarakat berkaitan erat dengan konsep representasi. Pitkin menjelaskan bahwa representasi politik mencakup kemampuan wakil rakyat untuk

bertindak atas nama dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya (Fenichel Pitkin, 1967). Dalam perkembangan teori kontemporer, representasi tidak hanya bersifat formal tetapi mencakup kemampuan wakil rakyat dalam mengantisipasi dan merespon kebutuhan Masyarakat secara dinamis (Mansbridge, 2003). Oleh karena itu, DPRD memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan publik.

2.2 Reses sebagai Instrumen Demokrasi Lokal

Reses merupakan mekanisme formal yang memungkinkan anggota DPRD berinteraksi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Fungsi utama reses adalah untuk menyerap aspirasi dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Secara normatif, reses tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan rutin kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme demokrasi representatif di tingkat lokal. Dalam kesempatan ini DPRD bukan hanya menjalankan fungsi representasi tetapi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Diharapkan reses menjadi ruang strategis bagi Masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan secara langsung kepada wakil rakyat. Melalui reses, Masyarakat bukan hanya saja sebagai obyek kebijakan publik tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam Pembangunan.

Namun demikian, efektivitas reses sangat bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat dan komitmen politik serta transparansi anggota DPRD. Tanpa adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas, reses berpotensi menjadi kegiatan formalitas administratif semata.

2.3 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik. Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara deliberatif dan berorientasi konsensus (Ansell and Gash, 2008).

Proses collaborative governance mencakup beberapa elemen penting, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan hasil antara (*intermediate outcomes*). Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antaraktor dan kesetaraan dalam distribusi kekuasaan.

2.4 Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam good governance yang menekankan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Bovaird dalam Astuti menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga dengan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Astuti Retno sunu, Warsono Hadi, 2020)

Dalam konteks penyerapan aspirasi, akuntabilitas tercermin dalam sejauh mana aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kembali kepada publik. Rendahnya akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

2.5 Gap antara Aspirasi dan Kebijakan

Salah satu permasalahan utama dalam penyerapan aspirasi adalah adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2016). Dengan demikian, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan.

Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan, dan dinamika politik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan secara sistematis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena penyerapan aspirasi masyarakat dalam konteks lokal.

Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Informan penelitian terdiri dari anggota DPRD, Pejabat Bappeda, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dinamika Penyerapan Aspirasi pada Masa Reses DPRD

Untuk memahami dinamika penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses DPRD Kabupaten Merauke, penelitian ini menganalisis data hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi menggunakan teknik coding kualitatif. Proses ini dilakukan melalui pengelompokan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan, sehingga dapat diidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antarvariabel dalam proses penyerapan aspirasi. Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Coding Kualitatif Penyerapan Aspirasi

Tema Utama	Kategori	Temuan Lapangan	Interpretasi
Aspirasi Masyarakat	Infrastruktur & bantuan sosial	Dominasi usulan jalan, jembatan, bantuan individu	Aspirasi pragmatis dan jangka pendek
Kesenjangan Kebijakan	Tidak sinkron dengan RPJMD	Aspirasi tidak masuk prioritas daerah	Integrasi lemah
Hambatan Struktural	Anggaran terbatas	Banyak aspirasi tidak terealisasi	Kapasitas fiskal rendah
Hambatan Birokrasi	Sistem hierarkis	Proses keputusan <i>top-down</i>	Partisipasi tidak substantif
Hambatan Politik	Kedekatan elit	Aspirasi diprioritaskan berdasarkan relasi	Distorsi representasi
Akuntabilitas	Tidak ada feedback	Masyarakat tidak tahu hasil aspirasi	Transparansi rendah
Outcome	Hasil parsial	Bantuan kecil (<i>small wins</i>)	Tidak transformasional

Sumber data: olahan data primer

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa aspirasi masyarakat yang muncul dalam kegiatan reses didominasi oleh kebutuhan yang bersifat praktis, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi aspirasi masih berada pada tingkat kebutuhan dasar, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan strategis pembangunan jangka panjang. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

Di sisi lain, proses penyerapan aspirasi melalui reses menunjukkan adanya dinamika interaksi antara aktor legislatif dan masyarakat yang belum sepenuhnya deliberatif. Dialog yang terjadi cenderung bersifat satu arah dan belum menghasilkan pemahaman bersama yang kuat. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini menunjukkan bahwa elemen penting seperti trust building dan shared understanding belum berkembang secara optimal (Ansell and Gash, 2008).

4.2 Kesenjangan antara Aspirasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Aspirasi yang disampaikan masyarakat seringkali tidak dapat diakomodasi dalam program pembangunan karena tidak sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi belum terintegrasi secara sistematis dengan proses perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat cenderung berdiri sendiri sebagai input informal, sementara RPJMD disusun melalui mekanisme teknokratis yang lebih terstruktur. Akibatnya, terjadi disconnect antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang dihasilkan.

Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai *policy mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara input publik dan output kebijakan (Dye, 2016). Jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah daerah serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.

4.3 Hambatan Struktural dalam Penyerapan Aspirasi

Hambatan struktural menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat. Keterbatasan anggaran daerah merupakan kendala utama yang menyebabkan banyak aspirasi tidak dapat direalisasikan. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Merauke, kapasitas fiskal yang terbatas menjadi faktor pembatas dalam implementasi program pembangunan. Selain itu, kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor penting. Koordinasi antar instansi yang belum optimal serta prosedur birokrasi yang panjang menyebabkan proses tindak lanjut aspirasi menjadi lambat. Budaya birokrasi yang masih hierarkis juga memperkuat dominasi pendekatan *top-down* dalam pengambilan keputusan.

Dalam kerangka governance, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan belum sepenuhnya mendukung partisipasi publik yang efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Bovaird dalam Astuti Retno sunu, Warsono Hadi (2020), tata kelola yang baik memerlukan adanya keterbukaan dan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, yang dalam

kasus ini masih belum tercapai.

4.4 Hambatan Politik dan Distorsi Representasi

Selain faktor struktural, dimensi politik juga memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyerapan aspirasi. Penelitian ini menemukan bahwa kedekatan antara masyarakat dan anggota DPRD dapat mempengaruhi prioritas realisasi aspirasi. Aspirasi dari kelompok masyarakat yang memiliki hubungan politik lebih kuat cenderung lebih cepat diakomodasi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya distorsi dalam fungsi representasi. Secara ideal, DPRD seharusnya bertindak sebagai representasi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, kepentingan politik seringkali mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, intervensi dari eksekutif dalam penentuan prioritas pembangunan juga menjadi faktor yang membatasi ruang gerak DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif masih menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan publik di daerah.

4.5 Rendahnya Akuntabilitas dalam Tindak Lanjut Aspirasi

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat akuntabilitas dalam proses tindak lanjut aspirasi. Masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi mengenai apakah aspirasi yang mereka sampaikan telah diproses atau tidak. Ketidadaan mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses reses. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses. Dalam perspektif good governance, akuntabilitas merupakan elemen kunci yang menentukan kualitas pelayanan publik. Tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas, proses penyerapan aspirasi akan kehilangan makna substantifnya (Ansell and Gash, 2008).

4.6 Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi Lokal

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun reses merupakan instrumen penting dalam demokrasi lokal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Proses penyerapan aspirasi yang terjadi cenderung bersifat administratif dan belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik. Hal ini berdampak pada kualitas demokrasi lokal, dimana partisipasi masyarakat belum mampu mendorong perubahan kebijakan secara substantif. Dalam konteks ini, reses berpotensi menjadi sekadar ritual politik tanpa makna deliberatif. Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi, diperlukan reformasi dalam mekanisme reses, termasuk integrasi dengan sistem perencanaan

pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi digital.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat dalam masa reses DPRD Kabupaten Merauke masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, politik, maupun kelembagaan. Proses penyerapan aspirasi masih bersifat administratif dan belum mencapai esensi deliberatif. Kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam tindak lanjut aspirasi juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas reses. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme partisipasi publik, meningkatkan integrasi antara reses dan perencanaan pembangunan, serta memperbaiki sistem akuntabilitas agar lebih transparan dan responsif.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal tidak hanya bergantung pada keberadaan mekanisme formal seperti reses, tetapi juga pada kualitas implementasi, integrasi kebijakan, dan akuntabilitas kelembagaan. Tanpa reformasi yang menyeluruh, reses berpotensi tetap menjadi ritual administratif yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif.

6. Referensi

- Ansell, C. and Gash, A. (2008) 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Astuti Retno sunu, Warsono Hadi, R.A. (2020) *Collaborative Governance*.
- Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. (1980) 'Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity', *World development*, 8(3), pp. 213–235.
- Dye, T.R. (2016) *Understanding Public Policy Fifteenth Edition*. Fifteenth.
- Fenichel Pitkin, H. (1967) 'The concept of representation'. University of California Press.
- Mansbridge, J. (2003) 'Rethinking representation', *American political science review*, 97(4), pp. 515–528.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative data analysis*. sage.
- Mulyadi, D. (2015) *Studi kebijakan publik & pelayanan publik. konsep dan aplikasi proses kebijakan publik dan pelayanan publik*. I. Bandung: Alfabeta.
- Slameto, B.D.F.-F.Y. (2003) 'Mempengaruhinya', *Jakarta: Rineka Cipta* [Preprint].